



THE FUTURE OF GOVERNANCE IN ASIA AND PACIFIC ROUNDTABLE

Pada 16 Desember 2021 berlangsung diskusi mengenai “The Future of Governance and Pacific Roundtable” sebagai salah satu agenda dari rangkaian OGP Global Summit 2021. Pertemuan diskusi virtual tingkat tinggi ini dimoderatori oleh **Ibu Helen Clark**, Mantan Perdana Menteri Selandia Baru. Dihadiri oleh **Ibu Dinara Musabekova** selaku Central Asia Civil Society Institute, **Bapak Sayed Ikram Afzali** selaku Integrity Watch Afghanistan, **Ibu Karol Ilagan** selaku Philippine Center for Investigative Journalist, **Nicola Nixon** selaku Senior Director of Governance at The Asia Foundation, dan **Bapak Yanuar Nugroho** selaku OGP Envoy Indonesia untuk membahas tren politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi masa depan pemerintahan di kawasan Asia dan Pacific.

*On December 16, 2021, a discussion on “The Future of Governance and Pacific Roundtable” was held as one of the agendas of the 2021 OGP Global Summit series. This high-level virtual discussion meeting was moderated by Ms. **Helen Clark**, Former Prime Minister of New Zealand. The discussion is also attended by Ms. **Dinara Musabekova** from Central Asia Civil Society Institute, Mr. **Sayed Ikram Afzali** from Integrity Watch Afghanistan, Mrs. **Karol Ilagan** from Philippine Center for Investigative Journalist, **Nicola Nixon** as Senior Director of Governance at The Asia Foundation, and Mr. **Yanuar Nugroho** as OGP Envoy Indonesia to discuss political, economic, and social trends that affect the future of governance in the Asia and Pacific region.*

Bapak Suharso Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Nasional pada sambutan di pembukaan diskusi menegaskan komitmen Indonesia untuk dapat terus mendukung semangat tata kelola pemerintahan yang baik dan ekonomi global, termasuk dalam agenda G20 presidency yang diselenggarakan tahun depan, “Indonesia akan terus berupaya meningkatkan transparansi dan mengembangkan tindakan baru yang ditargetkan dengan memfokuskan pada topik-topik utama yang dapat menambahkan nilai dalam G20”.

Nilai-nilai transparansi, keterbukaan, partisipatif, dan inovatif akan membentuk pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, membangun tata kelola pemerintahan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut menghadapi tantangan dengan adanya kasus korupsi, bisnis, dan politik uang dalam upaya pembangunan. Tantangan semakin nampak ketika menghadapi pandemi, sehingga disadari pentingnya kapasitas dan kemampuan pemerintah untuk bertindak cepat dalam mengambil kebijakan.

Menanggapi kondisi pandemi yang terjadi, diperlukan keselarasan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi kemungkinan krisis di masa depan. Pentingnya kerjasama selaras dengan pemaparan Bapak Yanuar Nugroho, “As the world problem is getting more complicated, the government needs to work together with other non-state actors”.

Mr. Suharso Monoarfa as Indonesian Minister of National Planning in his remarks at the opening of the discussion emphasized Indonesia's commitment to be able to continue to support the spirit of good governance and the global economy, including in the G20 presidential agenda which will be held next year, "Indonesia will continue to strive to increase transparency and develop new actions targeted by focusing on key topics that can add value to the G20"

The values of transparency, openness, participation, and innovation will form a government that is more open, transparent, accountable, and responsive to the needs of the community. However, building governance that can meet the needs of the community faces challenges with cases of corruption, business, and money politics in development efforts. Challenges are increasingly visible when facing the pandemic, so the government is aware of the importance of the capacity and ability to act quickly in making policies.

Responding to the current pandemic conditions, it is necessary to harmonize cooperation between the government and the community to prepare both sides as well as possible to face possible crises in the future. The importance of cooperation is in line with the explanation of Mr. Yanuar Nugroho, "As the world problem is getting more complicated, the government needs to work together with other non-state actors".

Penting adanya kerjasama antar *stakeholders* untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih terjangkau dan transparan melalui upaya kolektif dan sinergis dalam *co-creation* secara berkelanjutan. Tata kelola yang baik diharapkan dapat menurunkan tingkat korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mencapai target pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Collaboration between stakeholders needs to assist the government in providing more affordable and transparent public services through collective and synergistic efforts in sustainable co-creation. Good governance is expected to reduce the level of corruption and increase public confidence in achieving the government's development targets.